

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI DKI JAKARTA

**BEKERJA DAN BERKARYA
DALAM MELINDUNGI ASET IBU KOTA**

Jakarta, ibukota Indonesia

Jakarta, kota kebanggaan kita

Jakarta, hai kota metropolitan

Jakarta, penuh dengan keramaian

Lirik lagu Rhoma Irama dengan judul Jakarta merupakan representasi benak masyarakat tentang Jakarta. Jakarta dengan “Gedungnya tinggi-tinggi, mencakar langit” menjadi parameter kota dengan julukan metropolitan. Sebagai ibu kota negara, Jakarta melalui Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah kota yang memiliki perkembangan dan kemajuanyang sangat pesat diberbagai bidang dan sektor. Perkembangan kota tersebut tentu akan berbanding lurus dengan dengan pengelolaan aset pemerintah daerahnya, yang juga akan berbanding lurus pula dengan arsip aset yang dikelolanya.

Aset daerah merupakan barang milik daerah yang menjadi salah satu bagian dari kekayaan negara yang perlu dikelola dengan baik dan benar. Dalam rangka menjaga, memelihara dan menyelamatkan kekayaan negara itu, perlu diimbangi dengan pengelolaan arsip aset yang baik,



Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
Catur Laswanto

khususnya di daerah yang memiliki aset cukup besar, pemerintahan Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan giat melaksanakan program pelindungan arsip aset pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Dipimpin oleh Catur Laswanto yang malang melintang menjadi pemimpin di berbagai unit kerja pada pemerintahan Provinsi DKI Jakarta menjadi pengalaman yang berharga dan menjadi modal untuk berkiprah dengan baik pada bidang kearsipan, selalu belajar dari setiap amanah tugas yang diberikan menjadikan pria yang biasa disapa Pak Catur ini

memberi kesan sebagai pribadi yang hangat dan penuh semangat.

Kehadirannya yang baru menjabat Empat hari pada saat berhasil mempersembahkan penghargaan sebagai juara II melalui Pemilihan Lembaga Kearsipan Daerah Terbaik Nasional Wilayah Kearsipan Daerah II Tahun 2017, tentu belum cukup, pencapaian ini masih ingin terus di tingkatkan. “Kita harus mencapai yang lebih dari itu, karenanya langkah-langkah kedepan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta terus mengembangkan dan melahirkan inovasi-inovasi dibidang kearsipan”, tegasnya. Satu cita-cita mulia beliau adalah menjadikan “Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta yang disegani”. “Dikatakan disegani jika fungsi dari Dinas Arsip itu betul-betul mampu menjadi pengelola arsip yang dibutuhkan masyarakat dan pemerintah dengan kualitas yang mumpuni”, terangnya. Lebih lanjut Catur Laswanto menekankan bahwa jangan ada kesan dinas arsip hanya mengumpulkan surat-surat lama yang tidak terpakai. Baginya menunjukkan kinerja bidang kearsipan yang baik dan berkualitas akan menimbulkan feedback untuk menjadi disegani. “*We have developed our dignity,*



Penyimpanan arsip aset Provinsi DKI Jakarta.

kehormatan kita, kita yang bangun”, tukasnya.

Menginventaris dan mengelola arsip aset Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang sangat besar tentu bukan perkara yang mudah, apalagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta sangat berbeda dengan pemerintahan provinsi lain, Dinas arsip Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta mengelola arsip dari tingkat provinsi sampai dengan kelurahan, hal ini karena di tingkat Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta tidak ada pemerintahan sendiri untuk tingkat Kabupaten/Kota. Kedudukan dinas arsip kabupaten/kota berada dibawah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.

Selayang Pandang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

Terletak di jalan perintis kemerdekaan blok 5 Nomor 1, Pulo

Gadung Jakarta Timur, gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang disingkat dengan nama Dispusip memiliki visi terwujudnya pelayanan prima dalam bidang perpustakaan dan arsip. dan misi mewujudkan tata kelola penyelenggaraan perpustakaan dan arsip yang baik dengan menerapkan kaidah-kaidah *Good Governance*, mengembangkan sarana dan prasarana perpustakaan dan arsip bertaraf nasional dan/ atau internasional, dan meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan dan arsip dalam kehidupan bermasyarakat, berpemerintahan, berbangsa dan bernegara.

Secara umum penyelenggaraan kearsipan pada satuan kerja perangkat daerah sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah kearsipan walaupun implementasinya masih perlu terus ditingkatkan. Diantara pelaksanaan tersebut

adalah menerima dan menyelamatkan arsip dinamis Jadwal Retensi Arsip (JRA) diatas 10 Tahun yang diserahkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/ UKPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi DKI Jakarta, menerima dan menyelamatkan arsip statis yang diserahkan oleh SKPD/ UKPD, BUMD di Provinsi DKI Jakarta dan melaksanakan pembinaan kearsipan bagi SKPD/UKPD, BUMD, Organisasi Masyarakat / Organisasi Politik di provinsi DKI Jakarta.

Adapun Program prioritas yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta adalah:

a) Melaksanakan alih media (digitalisasi) arsip vital dan arsip statis yang sering dipergunakan oleh SKPD/ UKPD, BUMD dan Perseorangan (masyarakat).

b) Menjalinkan kerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta dalam rangka percepatan layanan arsip vital dan arsip statis.

Sedangkan program prioritas yang akan dilaksanakan:

a) Berkoordinasi dengan SKPD untuk melaksanakan pengelolaan arsip dinamis dengan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD).

b) Mengolah arsip statis dengan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS)

c) Melaksanakan penyusutan arsip/dokumen yang sudah melewati batas usia simpan sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip (JRA).

Dalam menjalankan program tersebut, tentunya tidak berjalan dengan mulus, terdapat beberapa hambatan, diantaranya sebagian besar SKPD tidak memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pengelolaan arsip berbasis SIKD, dan sebagian besar arsip keuangan yang akan disusutkan belum dibuat daftar arsip. Sedangkan langkah yang diambil yang di ambil untuk mengatasi hambatan tersebut adalah mengoptimalkan sosialisasi implementasi pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 74 Tahun 2008 tentang Pembakuan Prasarana dan Sarana Kearsipan pada SKPD/UKPD, BUMD di Provinsi DKI Jakarta. Serta mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan untuk membuat daftar arsip yang disusutkan.

Terkait dengan digitalisasi arsip, kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta berpendapat bahwa hal ini merupakan sebuah keharusan, mengingat kebutuhan tempat yang jauh lebih efisien, keamanan backup arsip akan



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta menerima penghargaan ANRI Award sebagai juara II melalui Pemilihan Lembaga Kearsipan Daerah Terbaik Nasional Wilayah Kearsipan Daerah II Tahun 2017

lebih terjamin, akses jika codingnya sudah dibuat maka pencariannya akan lebih mudah, digitalisasi juga bisa langsung di input ke website, selanjutnya dengan website maka akses dan kemudahan masyarakat dapat terpenuhi.

Pengelolaan Arsip Aset Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta mengelola arsip aset Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta guna mendukung bukti kepemilikan aset dengan berbagai cara antara lain:

a) Telah menjalin kerja sama dengan Badan Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah DKI Jakarta (BPAD) dan kantor Kecamatan dalam mendapatkan duplikat arsip aset Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan Duplikat Akte Jual Beli (AJB) dari kantor Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta.

b) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta menyimpan peraturan perundang-undangan tentang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah

(SIPPT) sebagai bukti kepemilikan aset di Provinsi DKI Jakarta;

c) Dalam rangka percepatan layanan arsip, pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan berbasis teknologi dengan sistem SIKD;

d) Berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam percepatan layanan arsip vital berupa layanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) online, masyarakat yang memerlukan arsip IMB tidak perlu datang ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, tetapi cukup datang ke Satuan Pelaksana (Satlak) PTSP Tingkat Kecamatan atau Satuan Pelaksana (Satlak) PTSP Tingkat Kelurahan, Kantor PTSP (KPTSP) yang di tingkat Kota dan Kabupaten dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi untuk data IMB yang diperlukan.

Sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, Catur Laswanto berperan

DAERAH

dalam memberikan data dukung berupa arsip aset terhadap masyarakat dalam rangka permohonan yang diajukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk surat tanah atau IMB dengan jumlah yang cukup besar tiap tahunnya. Hal ini berarti keberadaan arsip aset yang disimpan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta merupakan hal yang sangat diperlukan guna proses keluarnya izin kepada masyarakat.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan Pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintahan baik perizinan maupun non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap Permohonan sampai terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat. Di DKI Jakarta Program PTSP ini sudah di Launching oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, tepatnya pada tanggal 2 Januari 2015. Program ini dilakukan dengan harapan dapat melayani masyarakat dengan lebih baik dan lebih mudah, Melayani Masyarakat dengan lebih cepat, lebih ramah, bebas Pungli pastinya, Lebih Transparan, dan lebih jelas dari Persyaratan, biaya dan Waktunya (red).

Untuk instrumen hukum yang telah ditetapkan, melalui Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 173 Tahun 2016 tentang Pengamanan Dokumen Kepemilikan Aset Tanah dan Kendaraan Dinas Operasional, yang ditujukan untuk Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan langkah-langkah:

a) melakukan inventarisasi seluruh dokumen asli kepemilikan bidang tanah yang masih berada dalam lingkungan unit Saudara, diantaranya berupa kuitansi, Surat Pelepasan Hak (SPH), Sertifikat/Girik dan dokumen lainnya;



Penyimpanan arsip statis Provinsi DKI Jakarta

b) melakukan inventarisasi seluruh dokumen asli kepemilikan kendaraan dinas operasional yang masih berada dalam lingkungan unit Saudara, berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan dokumen lainnya;

c) dalam rangka pengamanan atas dokumen tersebut di atas agar Saudara segera menitipkan dokumen tersebut kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta;

d) sebelum melaksanakan penitipan dokumen agar melakukan digitalisasi dokumen yang disimpan dalam bentuk data digital baik dokumen tanah ataupun dokumen kepemilikan kendaraan dinas operasional;

e) penitipan dokumen kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk dokumen asli dan data digital;

f) melakukan pencatatan salinan dokumen yang dititipkan dan menerima daftar register penerimaannya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta;

g) menyerahkan data digital dan salinan daftar register penerimaannya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta kepada Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan

h) memperhatikan Instruksi Gubernur Nomor 142 Tahun 2016 tentang Pengamanan Aset Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dengan target menyusun 24 Peraturan Gubernur sebagai amanat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Kearsipan yang sedang disusun, target seluruh SKPD/UKPD, BUMD memiliki ruang simpan di unit pengolah dan record center di unit kearsipan, prasarana dan sarana bidang kearsipan yang memadai, mengoptimalkan pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi dengan SIKD pada SKPD/UKPD merupakan pekerjaan yang masih akan terus wujudkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta, sehingga Jakarta, sebagai Ibu Kota menjadi kota kebanggaan kita bersama. (©d)